

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kabupaten Kulon Progo

4.1.1 Kondisi Umum Kabupaten Kulon Progo

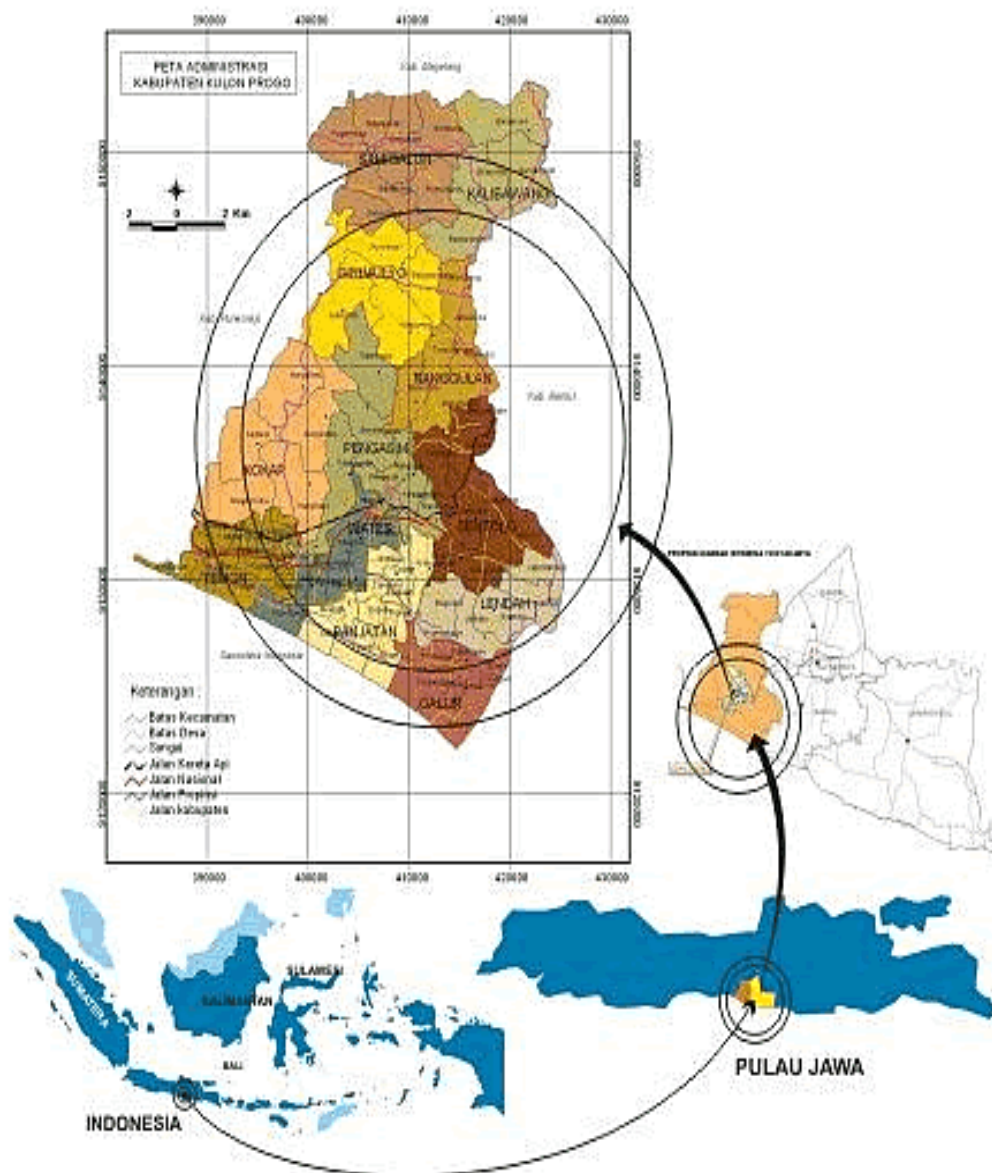
4.1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut (Progo, 2017):

- Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
- Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta
- Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
- Selatan : Samudera Hindia

Kabupaten Kulon Progo beribukota di Wates dan terletak 30 km sebelah barat kota Yogyakarta dengan luas 586,28 km². Wilayah kabupaten Kulon Progo sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Kulon Progo



Sumber: www.kulonprogokab.go.id

4.1.1.2 Topografi

Batas - batas topografi kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

- Barat : 110 derajat Bujur Timur 1' 37"
- Timur : 110 derajat Bujur Timur 16' 26"
- Utara : 7 derajat Lintang Selatan 38' 42"
- Selatan: 7 derajat Lintang Selatan 59' 3"

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi Bagian Utara, Bagian Tengah, dan Bagian Selatan.

4.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

Tabel 4.1
Perkembangan PAD Kab. Kulon Progo Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah PAD
2014	Rp 158.798.031.003,19
2015	Rp. 170 822 326 558,34
2016	Rp. 180 273 363 594.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo

4.2 Profil Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY)

4.2.1 Visi dan Misi

4.2.1.1 Visi

“Menjadi Bank Terpercaya, Istimewa dan Pilihan Masyarakat”

Terpercaya: Komitmen tinggi menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan.

Istimewa: Unggul dalam layanan dan produk yang inovatif berbasis budaya.

Pilihan Masyarakat: mencapai market share terbesar didaerah istimewa yogyakarta.

4.2.1.2 Misi

1. Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan.
2. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mencapai SDM yang unggul, berintegritas dan profesional.
4. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif berbasis budaya untuk menjadi *Regional Champion* yang berkelanjutan.
5. Menjalankan fungsi Agen pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan.

4.2.2 Budaya Kerja Dan Perilaku Utama ISTIMEWA

Integritas : - Beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa

- Menerapkan kejujuran,keikhlasan dan menjaga kepercayaan

Sigap : - Bertindak dengan cepat dan tanggap berkerja

- Menerapkan layanan yang peduli,cerdas dan berbudaya

Tangguh : Bekerja keras,dan pantang menyerah dalam segala situasi

Inovatif : Melakukan pengembangan yang berkelanjutan

Mutu : Mengedapkan kesempurnaan dalam semua hasil kerja

Empati : Membangun hubungan saling menghormati dan menghargai

Waspada : Menerapkan prinsip kehati hatian dan tata kelola yang baik

Antusias : Semangat tinggi dalam berkerja untuk mencapai hasil baik

4.2.3 Nilai-Nilai RAMAH

Respek : Rasa hormat

Akurat : Tepat

Modern : Visioner/berpikir ke depan

Amanah : Terpercaya

Handal : Kuat dan Mampu

4.2.4 Struktur Dan Komposisi Pemegang Saham

Tabel 4.2
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Keterangan	Rupiah	%	Jumlah Lembar Saham
Pemerintah Daerah DIY	233,500,000,000	41,73	233,5
Pemerintah Kota Yogyakarta	29,246,000,000	5,23	29,246
Pemerintah Kabupaten Sleman	144,270,000,000	25,79	144.270
Pemerintah Kabupaten Bantul	71,555,000,000	12,79	71.555
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	33,576,000,000	6	33.576
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	47,338,000,000	8,46	47.338
Total Kota & Kabupaten	325,985,000,000	58,27	325.985
Jumlah	559,485,000,000	100.00.00	559.485

Bank BPD DIY dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, modal dasar Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2015 telah disetor sebesar Rp 735.631.000.000,-.

Berdasarkan akta notaris No.2 tanggal 5 April 2013 yang dibuat dihadapan notaris Muchammad Agus Hana , S.H., telah dilakukan perubahan bentuk

badan hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sehingga modal dasar Perseroan pertama kali sebesar Rp1.000.000.000.000, terbagi atas 1.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000, yang terbagi atas sebanyak 510.000 lembar saham akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebanyak 490.000 lembar saham akan dimiliki oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0044251.AH.01.09 tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 September 2013 No.73.

4.2.5 Identitas Perusahaan

Nama	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
<i>Nama Panggilan</i>	Bank BPD DIY
Bidang Usaha	Industri Keuangan (Perbankan)
Kepemilikan saham yang telah disahkan dalam RUPST 2015	<ul style="list-style-type: none"> • 41,73% Pemerintah Daerah DIY • 5,23% <i>Pemerintah Kota Yogyakarta</i> • 25,79% Pemerintah Kabupaten Sleman • 12,79% Pemerintah Kabupaten Bantul • 6,00% Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
Tanggal Pendirian	15 Desember 1961
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961, berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Bank DIY mendapatkan ijin usaha berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BUM 9-1-27/II tanggal 5 Maret 1962. • Berdasarkan akta notaris No.2 tanggal 5 April 2013 yang dibuat dihadapan notaris Muchammad Agus Hana , S.H., telah

	<p>dilakukan perubahan bentuk badan hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sehingga modal dasar</p> <p>Perseroan pertama kali sebesar Rp1.000.000.000.000, terbagi atas 1.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000, yang terbagi atas sebanyak 510.000 lembar saham akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebanyak 490.000 lembar saham akan dimiliki oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.</p> <p>Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0044251.AH.01.09 tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 September 2013 No.73.</p>
Modal Pasar	Rp1.000.000.000.000,00
Modal ditempatkan dan di setor penuh	Rp559.485.000.000
Dana Setoran Modal	Rp. 176.146.000.000
Total ekuitas	Rp. 1.225.035.387.731
Jumlah Karyawan	987 Karyawan
Jaringan Kantor	6 Kantor Cabang
	1 Kantor Cabang Syariah
	28 Kantor Cabang Pembantu
	80 Kantor Kas
	26 Payment Point
	6 Kas Mobil
	31 Layanan Syariah
	99 Terminal ATM
Kantor Pusat	Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta
Website	www.bpddiy.co.id
Email	humas@bpddiy.co.id
Telp.	0274-561614
Fax	0274-562303

1.2.7 Gambaran Umum Pelaksanaan Good Corporate Governance

1. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG Tahun 2014

4.2.6 Manajemen PT. Bank BPD DIY

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Ainun Na'im
Komisaris	Djoko Susanto
Komisaris	Bambang Wisnu Handoyo
Direksi	
Direktur Utama	Bambang Setiawan
Direktur Pemasaran	Bambang Ghiri Dwi
Direktur Umum	Kuncoro
Direktur Kepatuhan	Cahya Widi
	Santoso Rohmad
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	H.M Thoha Abdurrahman
Anggota	Syafaruddin Alwy
Pemimpin Divisi/SPI/UUS/Pemimpin Desk	
Divisi Perencanaan dan Pengembangan Divisi Trisuri	Arief Yulianto
Divisi Trisuri	Erna Wukiratun
Divisi Perkreditan	Widodo
Divisi Teknologi Informasi	Hangkoso
Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum	Gamal Kristiyanto
Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Kustianti
Satuan Pengawasan Intern	Widjayanto
Unit Usaha Syariah	Muhammad Afnan
Pemimpin Desk Administrasi & Keuangan	Bambang Parmana Hadi
Pemimpin Cabang	
Cabang Utama	Kwartono Rachmadi
Cabang Senopati	Agus Tri Murjanto
Cabang Sleman	Nur Iswanto
Cabang Bantul	Dian Ariani
Cabang Wates	Riani Ernastuti
Cabang Wonosari	Plati Soulistyanti
Cabang Syariah	Supriyanto

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) / Tata Kelola Usaha yang

Baik pada Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY selama tahun 2014 telah dilakukan secara efektif dan efisien sehingga perhitungan nilai komposit bagi PT. Bank BPD DIY menghasilkan predikat Sangat Baik, pelaksanaan tata kelola yang baik diwujudkan dalam bentuk keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi

hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang berlaku pada PT. Bank BPD DIY telah memenuhi lima prinsip dasar GCG.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG Tahun 2015

Hasil Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance Bank BPD DIY pada tahun 2015 mencapai peringkat komposit dengan peringkat “Low to Moderate” dengan Total Skor: 1,81 atau Peringkat: 2. Bank BPD DIY berkeinginan menjadikan Good Corporate Governance bukan sebagai formalitas penggugur kewajiban semata, melainkan sebagai sebuah “way of life” yang melekat di seluruh Insan Bank BPD DIY.

3. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG Tahun 2016

Bank mencapai Peringkat Komposit 1 (PK-1), dimana mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat baik atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.